

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

KECAMATAN JAKEN
KABUPATEN PATI
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN COVER | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Mandat Kinerja, dan Struktur Organisasi | 2 |
| 1.3 Isu-isu Strategis | 4 |
| 1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran | 6 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 9 |
| 1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024 | 10 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD | 11 |
| 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan | 13 |
| 2.3 Perjanjian Kinerja tahun 2024 | 14 |
| 2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja | 16 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | 18 |
| 3.2 Realisasi Anggaran | 28 |
| 3.3 Inovasi | 29 |
| 3.4 Penghargaan | 29 |
| BAB IV PENUTUP | |
| 4.1 Kesimpulan | 30 |
| 4.2 Rekomendasi | 30 |
| LAMPIRAN | |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | |
| RKT Tahun 2024 | |
| Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 | |
| RKT Perubahan Tahun 2024 | |

DAFTAR TABEL

Halaman

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 1.1 | : Jumlah ASN Kecamatan Jaken Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin Tahun 2024 | 6 |
| Tabel 1.2 | : Jumlah ASN Kecamatan Jaken Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin dan jenis jabatan Tahun 2024 | 6 |
| Tabel 1.3 | : Jumlah ASN Kecamatan Jaken Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin dan jenis jabatan Tahun 2024 | 6 |
| Tabel 1.4 | : Jumlah ASN Kecamatan Jaken Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin dan jenjang pendidikan Tahun 2024 | 7 |
| Tabel 1.5 | : Jumlah ASN Kecamatan Jaken Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin dan unit kerja Tahun 2024 | 7 |
| Tabel 1.6 | : Jumlah THL Kecamatan Jaken Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin Tahun 202 | 7 |
| Tabel 1.7 | : Alokasi dan Realisai Anggaran Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2024 | 8 |
| Tabel 1.8 | : Sarana Prasarana Kecamatan | 8 |
| Tabel 2.1 | : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN JAKEN TAHUN 2023-2026 | 11 |
| Tabel 2.2 | : Cascading Kecamatan Jaken | 12 |
| Tabel 2.3 | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 13 |
| Tabel 2.4 | : Perjanjian Kinerja Kecamatan Jaken Tahun 2024 | 15 |
| Tabel 3.1 | : Pengukuran Kinerja Tahun 2024 | 20 |
| Tabel 3.2 | : Skala Penilaian Kinerja | 21 |
| Tabel 3.3 | : Capaian Kinerja Tahun 2024 | 22 |
| Tabel 3.4 | : Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja | 23 |
| Tabel 3.5 | : Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah | 24 |
| Tabel 3.6 | : Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja | 26 |
| Tabel 3.7 | : Efisiensi penggunaan sumber daya | 28 |
| Tabel 3.8 | : Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | 29 |
| Tabel 3.9 | : Realisasi Anggaran | 31 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---------------------------------------|---------|
| Gambar 1.1 : Struktur Kecamatan Jaken | 5 |
| Gambar 2.1 : Aplikasi SAKIP | 17 |
| Gambar 2.2 : Aplikasi ESR Kemenpan | 17 |
| Gambar 2.3 : Website Kecamatan Jaken | 18 |
| Gambar 2.3 : Email Laporan LKJiP | 18 |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Jaken Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pati, bahwa Kecamatan Jaken mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Kecamatan Jaken

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Jaken melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis 2023 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Pati, 18 Februari 2025

Camat Jaken



R.M. AHMADA MANGKU NEGARA, S.STP, M.Si

Pembina / IV a

NIP. 198907272012061001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja ada kewajiban untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Laporan kinerja SKPD merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kerja SKPD berdasarkan rencana kerja yang telah disusun dan ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Laporan kinerja SKPD yang sering disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggungjawaban SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya selama 1 tahun anggaran.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Jaken Kabupaten Pati mengacu pada RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026 dan Renstra Kecamatan Jaken Kabupaten Pati 2023 – 2026.

Adapun landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jaken Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 6. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

1.2 Mandat Kinerja dan Struktur Organisasi

Mandat Kinerja

Kecamatan Jaken merupakan salah satu dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Pati. Kecamatan Jaken terletak di ujung timur dan tenggara dari Kabupaten Pati yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Rembang. Ibu kota Kecamatan Jaken terletak 30 kilometer arah timur dari ibu kota Kabupaten Pati.. Wilayahnya terdiri dari dataran rendah, dengan luas wilayah mencapai 6.852 ha, terdiri dari:

1. Lahan Sawah : 4.224 ha (61,65 %)
2. Lahan Bukan Sawah : 1.726 ha (25,19 %)
3. Lahan Bukan Pertanian : 902 ha (13,16 %)

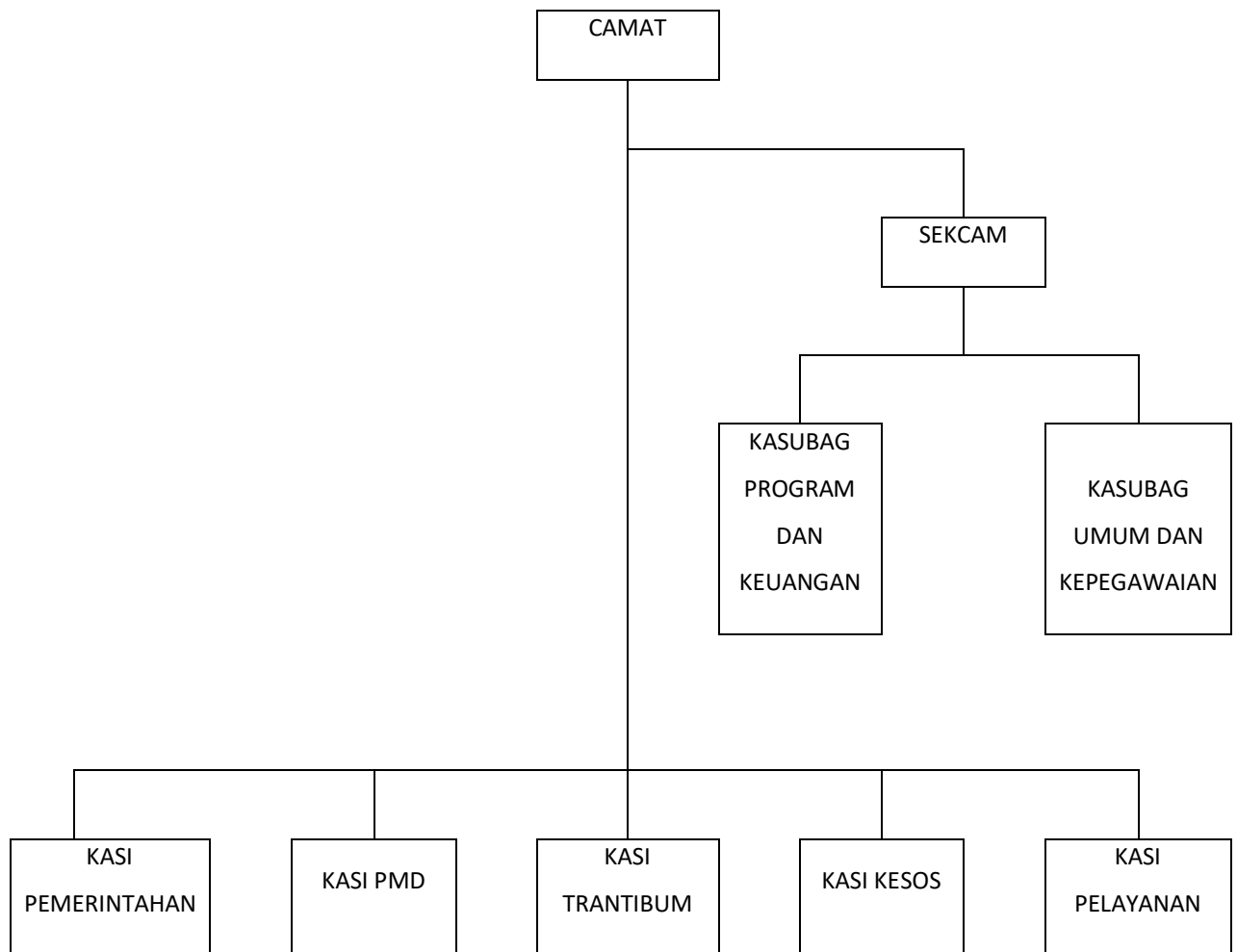
Secara administratif wilayahnya dibagi dalam 21 desa, 47 dukuh/dusun, 81 rukun warga (RW) dan 313 rukun tetangga (RT). Desa-desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Jaken yaitu:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Boto | 12. Sidomukti |
| 2. Trikoyo | 13. Mojoluhur |
| 3. Sumberan | 14. Kebonturi |
| 4. Mojolampir | 15. Lundo |
| 5. Mantingan | 16. Sukorukun |
| 6. Ronggo | 17. Sumberejo |
| 7. Sumberagung | 18. Manjang |
| 8. Sidoluhur | 19. Tamansari |
| 9. Srikaton | 20. Sumberarum |
| 10. Arumanis | 21. Sriwedari |
| 11. Tegalarum | |

Jumlah penduduk Kecamatan Jaken tahun 2022, sebanyak 47,823 jiwa, terdiri dari laki-laki 23.387 (50,07 %) dan perempuan 24.436 (49,93 %)(Sumber dari BPS : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2024).

2.2. Struktur Organisasi

Sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, struktur organisasi Kecamatan Jaken sebagai berikut:



**Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Jaken
Kabupaten Pati**

1.2 Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Dari hasil analisis dan telaah pelayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis keempat, yaitu Tata kelola pemerintah dengan menekankan kepada penguatan birokrasi dan peningkatan akses serta kualitas layanan

publik, walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah, yaitu terkait dengan: Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan menekankan pada pemerataan berbasis kelestarian lingkungan; Penurunan kemiskinan dengan fokus peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin; dan Peningkatan kualitas SDM dengan menekankan peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi masyarakat.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Jaken adalah: Optimalisasi kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
2. Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan
3. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan
4. Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa

1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam proses pencapaian tujuan serta sasaran organisasi. Dalam perkembangannya, seluruh pegawai Kecamatan Jaken Kabupaten Pati diharapkan mampu mengintegrasikan isu Responsif Gender ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat menjadi lebih baik dan lebih responsif gender.

Sebagai gambaran, berikut data terpilah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sebagai gambaran, berikut data terpilah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2024 dengan total jumlah ASN sebanyak 12 orang dan THL sebanyak 5 orang.

Tabel 1.1.
Jumlah ASN Kecamatan Jaken Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin Tahun 2024

| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------|-----------|
| Laki - laki | 10 |
| Perempuan | 2 |
| Total | 12 |

Tabel 1.2
Jumlah ASN Kecamatan Jaken Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin dan jenis jabatan Tahun 2024

| Jenis Jabatan | Laki - laki | Perempuan | Jumlah |
|--------------------|-------------|-----------|-----------|
| Jabatan Pelaksana | 3 | 1 | 4 |
| Jabatan Struktural | 7 | 1 | 8 |
| Total | 10 | 2 | 12 |

Tabel 1.3.
Jumlah ASN Kecamatan Jaken Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin dan jenis jabatan Tahun 2024

| Golongan Jabatan | Laki - laki | Perempuan | Jumlah |
|-------------------------------|-------------|-----------|--------|
| II/d - Pengatur Tk. I | 1 | 1 | 2 |
| III/a - Penata Muda | 2 | 0 | 2 |
| III/b - Penata Muda Tingkat I | - | - | - |
| III/c - Penata | 3 | 1 | 4 |
| III/d - Penata Tingkat I | 3 | 0 | 3 |

| | | | |
|----------------|-----------|----------|-----------|
| IV/b - Pembina | 1 | - | 1 |
| Total | 10 | 2 | 12 |

Tabel 1.4.
Jumlah ASN Kecamatan Jaken Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin dan jenjang pendidikan Tahun 2024

| Jenjang Pendidikan | Laki - laki | Perempuan | Jumlah |
|---------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| SLTA | 3 | 1 | 4 |
| S-1 | 4 | 1 | 5 |
| S-2 | 3 | - | 3 |
| Total | 10 | 2 | 12 |

Tabel 1.5.
Jumlah ASN Kecamatan Jaken Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin dan unit kerja Tahun 2024

| Unit Kerja | Laki - laki | Perempuan | Jumlah |
|--------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| Camat | 1 | - | 1 |
| Bidang Pelayanan | - | 1 | 1 |
| Bidang PMD | 1 | - | 1 |
| Bidang Kesos | 1 | - | 1 |
| Bidang Trantibum | 1 | - | 1 |
| Bidang Tata Pemerintahan | 3 | 1 | 4 |
| Sekretariat | 3 | - | 3 |
| Total | 10 | 2 | 12 |

Tabel 1.6.
Jumlah THL Kecamatan Jaken Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin Tahun 2024

| Jenis Kelamin | Jumlah |
|----------------------|---------------|
| Laki - laki | 2 |
| Perempuan | 1 |
| Total | 3 |

1. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi Anggaran Kecamatan Jaken Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7.
Alokasi dan Realisasi Anggaran Kecamatan Jaken Kabupaten Pati
Tahun 2024

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| Sumber Anggaran | : | DAU |
| Alokasi Anggaran Keseluruhan | : | 1.941.002.000 |
| Realisasi Anggaran Keseluruhan | : | 1.828.834.504 |

2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja kecamatan.

Tabel 1.8
Sarana Prasarana Kecamatan

| NO | Jenis Fasilitas | Jumlah | Keterangan |
|-----------|------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | Kantor Kecamatan | 1 | Baik |
| 2 | Aula Kecamatan | 1 | Baik |
| 3 | Rumah Dinas Camat | 1 | Baik |
| 4 | Kendaraan Dinas Roda 4 | 1 | Baik |
| 5 | Kendaraan Dinas Roda 2 | 8 | Baik |
| 6 | Pompa Air | 1 | Baik |
| 7 | Pendingin Ruangan AC | 5 | Baik |
| 8 | Mesin Ketik | 4 | Rusak |
| 9 | Komputer | 2 | Rusak |
| 10 | Laptop | 3 | Baik |
| 11 | Kursi Kerja | 20 | Baik |
| 12 | Kursi Rapat | 80 | Rusak |
| 13 | Papan data | 2 | Baik |
| 14 | Papan kegiatan | 2 | Baik |
| 15 | Kamar Mandi | 3 | Baik |
| 16 | Meja kerja | 20 | Baik |
| 17 | Printer | 4 | Baik |
| 18 | Televisi | 3 | Baik |
| 19 | Pesawat telepon | 1 | Rusak |

| NO | Jenis Fasilitas | Jumlah | Keterangan |
|-----------|------------------------|---------------|-------------------|
| 20 | Pesawat HT | 2 | Rusak |
| 21 | Sofa | 1 | Rusak |
| 22 | Filling Cabinet | 11 | Rusak |
| 23 | Rak Arsip | 6 | Rusak |
| 24 | Lemari Kayu | 4 | Rusak |
| 25 | Lemari Besi | 3 | Rusak |
| 26 | Meja Rapat | 6 | Rusak ringan |
| 27 | Meja Tulis | 14 | Rusak/Baik |
| 28 | Kipas Angin | 9 | Rusak Ringan |
| 29 | Papan Nama Kecamatan | 1 | Baik |

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Mandat Kinerja, dan Struktur Organisasi
- 1.3 Isu-isu Strategis
- 1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran
- 1.5 Sistematika Penulisan
- 1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.3 Perjanjian Kinerja tahun 2024
- 2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran
- 3.3 Inovasi
- 3.4 Penghargaan

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Rekomendasi

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024

Menindaklanjuti surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Nomor : 730/KH/025.39/2024. Tanggal 3 Juni 2024, tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Kec. Jaken tahun 2024 menyatakan kesanggupan untuk melakukan perbaikan sesuai hasil Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja khususnya pada dokumen LKjIP, untuk dapat mencantumkan data perbandingan target dan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya.
2. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Kecamatan Jaken maupun media sosial lain secara berkala.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Tujuan Kecamatan Jaken merupakan perwujudan konsistensi perencanaan dengan RPD Kabupaten Pati Tahun 2023–2026, dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPD. Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Jaken ini dijabarkan dalam tujuan dan sasaran untuk mewujudkan tujuan daerah yaitu Tujuan 6, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, pada Sasaran 6.1, Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan publik;

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunakan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Jaken sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN JAKEN
TAHUN 2023-2026

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Kinerja | Target Kinerja | | | |
|---|--|--|---|---------|----------------|------|------|------|
| | | | | Awal | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Tujuan 6 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik | | | | | | | | |
| Sasaran : 6.1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan public | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 3,28 | 3,31 | 3,33 | 3,36 | 3,38 |
| | | Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Meningkatnya kemandirian desa | Persentase desa mandiri | % | 3 | 5 | 7 | 8 |

Tabel 2.2
Cascading Kecamatan Jaken

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|---|--|--|--|---|--|---|--|
| Tujuan | Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat | | | | | | | | | |
| Indikator Kinerja Tujuan | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | | | | | | |
| Satuan | Angka | | | | | | | | | |
| Formula | Hasil survei kepuasan masyarakat | | | | | | | | | |
| Sasaran | Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | | Meningkatnya kemandirian desa | | | | | | | |
| Indikator Kinerja Sasaran | Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | | Persentase desa mandiri | | | | | | | |
| Satuan | Laporan | | Angka | | | | | | | |
| Formula | Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat | | Jumlah desa mandiri/ jumlah seluruh desa x 100% | | | | | | | |
| Program | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | | | | | | | |
| Kinerja Program | Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan | | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan | | | | | | | |
| Indikator Program | Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani | | Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan | | | | | | | |
| Satuan | Persen | | Persen | | | | | | | |
| Formula | Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan / jumlah seluruh permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan x 100% | | Jumlah desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan / jumlah desa dan/atau kelurahan x 100% | | | | | | | |
| Kegiatan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Bhusus Kec. Pus) | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | |
| Kinerja Kegiatan | Meningkatnya layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan | | Semua desa melibatkan masyarakat dalam pembangunan | | Semua kelurahan melibatkan masyarakat dalam pembangunan | | Semua desa/kelurahan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM | | Meningkatnya kesaadaran keluarga dalam keterlibatan Perencanaan kehidupan Menuju keluarga Berkualitas | |
| Indikator Kegiatan | Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan | | Jumlah desa yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan | | Jumlah kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan | | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM | | Jumlah keluarga yang mengingat kesaadarannya dalam keterlibatan Perencanaan kehidupan Menuju keluarga Berkualitas | |
| Satuan | Persen | | Desa | | Kelurahan | | Desa/Kelurahan | | Jumlah | |
| Formula | Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan dibagi jumlah pengajuan perizinan dan non perizinan secara keseluruhan x 100% | | Jumlah desa yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan | | Jumlah desa yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan | | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM | | Jumlah konflik sosial dan gangguan ketertarikan dan keterlibatan yang di koordinasikan penanganannya | |
| Sub kegiatan*) | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | |
| Kinerja Sub Kegiatan*) | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | Meningkatnya Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | Terlaksananya Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | |
| Indikator Sub Kegiatan*) | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | |
| Satuan | Dokumen | | Laporan | | Lembaga kemasyarakatan | | Laporan | | Dokumen | |
| Formula | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | |

*) Sesuai Kepmendagri 050.588 Tahun 2021

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, serta selaras dengan tujuan daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan, pelayanan maupun pengadministrasian, perencanaan, monitoring, serta evaluasi.

Dari peluang dan pendorong yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dengan memedomani alur perencanaan yang telah disusun dalam cascading perencanaan Kecamatan Jaken ditentukan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Jaken yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|--|---|
| Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat | Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan | 1. Peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan Non Usaha 2. Peningkatan kualitas Pelayanan Non Perizinan |
| | Meningkatnya kemandirian desa | Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan | 1. Memastikan semua desa/kelurahan melibatkan masyarakat dalam pembangunan 2. Memastikan semua desa/kelurahan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM 3. Peningkatan kesadaran keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas |
| | | Peningkatan koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan | Peningkatan koordinasi penanganan konflik sosial |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--------|---------|--|--|
| | | ketentraman dan ketertiban | dan gangguan ketentraman dan ketertiban |
| | | Optimalisasi keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan | Mengikutsertakan Forkompincam dalam setiap penyelenggaraan forum/pertemuan dalam rangka pemerintahan umum di Kecamatan |
| | | Memastikan ketepatan waktu semua desa/kelurahan dalam menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan | Fasilitasi desa/kelurahan dalam menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan |

Hasil perumusan tujuan, sasaran , startegi dan arah kebijakan yang disertai target kinerja akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan dengan disertai penganggaran, akan dipedomani Kecamatan Jaken dalam penyusunan perencanaan tahunan/Renja Kecamatan muai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 sebagai perwujudan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan.

2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang di sertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kespakatan antar pemerintah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Jaken Tahun 2024

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A. | Meningkatnya pelayanan kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 3,33 |
| 1. | Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | 1 |
| a. | Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan | Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani | 100% |
| 2. | Meningkatnya Kemandirian Desa | Persentase Desa Mandiri | 24% |
| a. | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan | Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan | 100% |
| b. | Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban | Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya | 100% |
| c. | Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan | Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan | 100% |
| d. | Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran | Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran | 100% |

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target |
|-----|---------------------------------------|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | dan pelaporan sesuai dengan ketentuan | dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu | |

| | PROGRAM | | ANGGARAN | KETERANGAN |
|---|---|-----|------------|------------|
| 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Rp. | 8,085,000 | APBD KAB |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rp | 62.625.500 | APBD KAB |
| 3 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Rp | 48,960,000 | APBD KAB |
| 4 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. | 31.476.800 | APBD KAB |

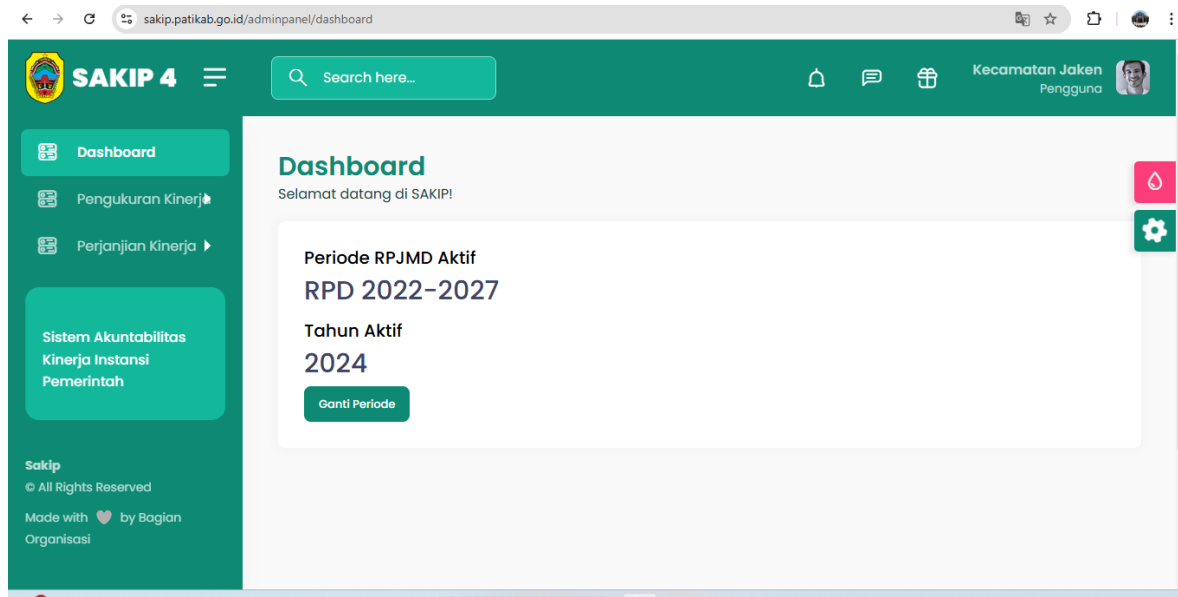
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kecamatan Jaken Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

- a. <https://sakup.patikab.go.id> dan <https://esr.menpan.go.id/>

Yang mengintegrasikan perencanaan, anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OP.

Gambar 2.1
Aplikasi SAKIP



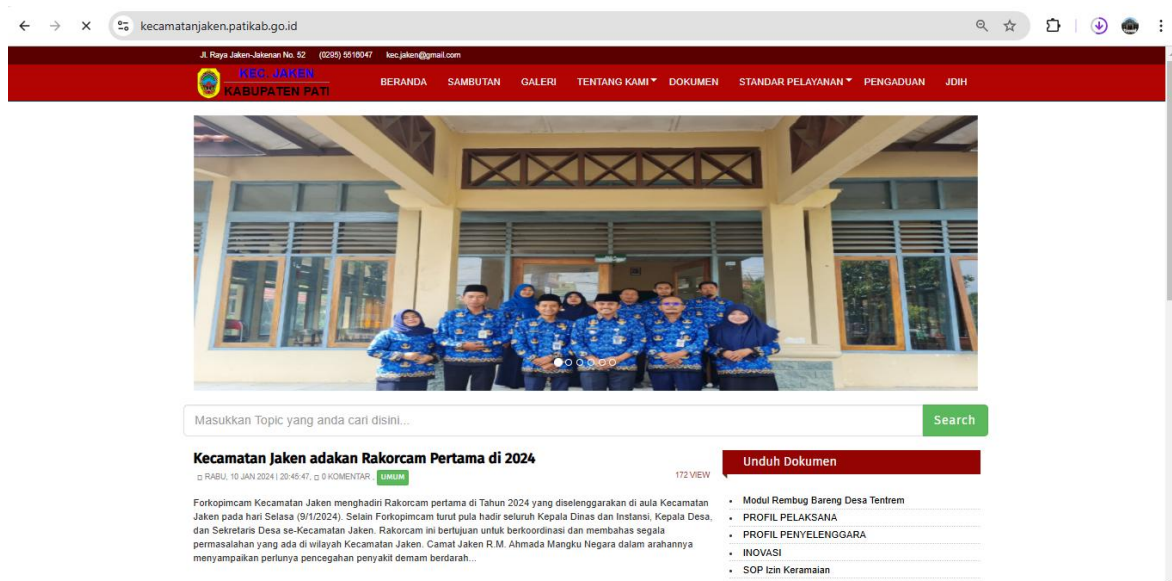
Gambar 2.2
Aplikasi ESR Kemenpan



b. Website Kecamatan Jaken

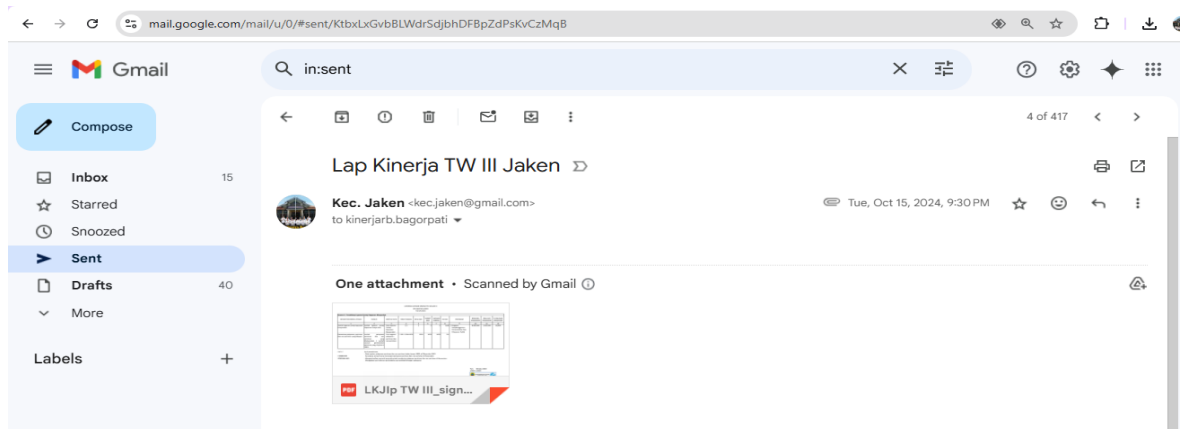
<https://kecamatanjaken.patikab.go.id/> adalah instrumen yang mendukung upaya keterbukaan publik melalui berbagai informasi dan laporan yang disajikan kepada masyarakat

Gambar 2.3
Website Kecamatan Jaken



c. Email ke kinerjarb.bagorpati@gmail.com

Gambar 2.4
Email Laporan LKJiP



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menganalisa keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Ada 3 (tiga) aspek dalam pembahasan akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Capaian Kinerja
2. Analisis Capaian Kinerja
3. Realisasi Anggaran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan serta membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang di rencanakan dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Jaken.

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Tahun 2024

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target | Tahun 2024 | | | Target Akhir RPJMD |
|----|---|--|--------|------------|-----------|------------|--------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Persentase | |
| A. | Meningkatnya pelayanan kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 3,33 | 3,33 | 100 | 3,37 |
| 1. | Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | Angka | 1 | 1 | 100 | 1 |
| a. | Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan | Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani | % | 100% | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Meningkatnya Kemandirian Desa | Persentase Desa Mandiri | % | 7 | 9 | 128 | 9 |
| a. | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan | Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan | % | 100% | 100 | 100 | 100 |
| b. | Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban | Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya | % | 100% | 100 | 100 | 100 |
| c. | Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan | Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan | % | 100% | 100 | 100 | 100 |
| d. | Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan | Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan | % | 100% | 100 | 100 | 100 |

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target | Tahun 2024 | | | Target Akhir RPJMD |
|----|-----------------------------------|---|--------|------------|-----------|------------|--------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Persentase | |
| | pelaporan sesuai dengan ketentuan | pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu | | | | | |

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Skala penilaian kinerja mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu :

Tabel 3,2

Skala Penilaian Kinerja

| No | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | $91\% \leq 100\%$ | Sangat Tinggi |
| 2 | $76\% \leq 90\%$ | Tinggi |
| 3 | $66\% \leq 75\%$ | Sedang |
| 4 | $51\% \leq 65\%$ | Rendah |
| 5 | $\leq 50\%$ | Sangat Rendah |

Pengukuran tingkat kinerja Kecamatan Jaken Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan capaian realisasinya sebagai berikut:

Pengukuran tingkat kinerja Kecamatan Jaken Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan capaian realisasinya sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tahun 2024

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target 2024 | Realiasi 2024 | Persentase | Kriteria |
|-----------|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| A. | Meningkatnya pelayanan kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 3,33 | 3,33 | 100 | Sangat Tinggi |
| 1. | Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | 1 | 1 | 100 | Sangat Tinggi |
| a. | Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan | Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani | 100% | 100 | 100 | Sangat Tinggi |
| 2. | Meningkatnya Kemandirian Desa | Persentase Desa Mandiri | 7 | 9 | 128 | Sangat Tinggi |
| a. | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan | Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan | 100% | 100 | 100 | Sangat Tinggi |
| b. | Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban | Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya | 100% | 100 | 100 | Sangat Tinggi |
| c. | Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan | Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan | 100% | 100 | 100 | Sangat Tinggi |
| d. | Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan | Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai | 100% | 100 | 100 | Sangat Tinggi |

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target 2024 | Realiasi 2024 | Persentase | Kriteria |
|----|-------------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------|----------|
| | | dengan ketentuan dan tepat waktu | | | | |

- Tabel diatas menunjukan bahwa capaian kualitas kinerja Kecamatan Jaken Tahun 2024, dengan kriteria sangat tinggi, relative sudah sesuai ekspektasi
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | 2023 | | | 2024 | | |
|----|---|---|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian |
| A. | Meningkatnya pelayanan kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 3,33 | 3,33 | 100 | 3,33 | 3,33 | 100 |
| 1. | Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| a. | Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan | Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Meningkatnya Kemandirian Desa | Persentase Desa Mandiri | 7 | 9 | 128 | 7 | 9 | 128 |
| a. | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan | Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| b. | Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan | Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | 2023 | | | 2024 | | |
|----|--|---|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian |
| | ketentraman dan ketertiban | dikoordinasikan penanganannya | | | | | | |
| c. | Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan | Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| d. | Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan | Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 3.5

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Capaian 2024 | Target Akhir 2025 | Tingkat Kemajuan |
|----|--|--|--------------|-------------------|------------------|
| A. | Meningkatnya pelayanan kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 3,33 | 3,38 | |
| 1. | Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | 1 | 1 | |
| a. | Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan | Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani | 100 | 100 | |

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Capaian 2024 | Target Akhir 2025 | Tingkat Kemajuan |
|----|--|---|--------------|-------------------|------------------|
| 2. | Meningkatnya Kemandirian Desa | Persentase Desa Mandiri | 5 | 7 | |
| a. | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan | Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan | 100 | 100 | |
| b. | Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban | Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya | 100 | 100 | |
| c. | Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan | Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan | 100 | 100 | |
| d. | Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan | Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu | 100 | 100 | |

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 - A. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Tabel 3.6

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Targ et | Real isasi | % Capa ian | Analisis Keberhasilan/ Kegagalan | Solusi yang dilakukan |
|----|--|---|------------|---------------|------------------|--|-----------------------------|
| A. | Meningkatnya pelayanan kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 3,33 | 3,33 | 100 | Sangat Baik | |
| 1. | Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | 1 | 1 | 100 | Sangat Baik | |
| a. | Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan | Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani | 100 | 100 | 100 | Sangat Baik | |
| 2. | Meningkatnya Kemandirian Desa | Persentase Desa Mandiri | 5 | 9 | 128 | Sangat Baik | |
| a. | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan | Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan | 100 | 100 | 100 | Sangat Baik | |
| b. | Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban | Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya | 100 | 100 | 100 | Sangat Baik | |
| c. | Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan | Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan | 100 | 100 | 100 | Sangat Baik | |
| d. | Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan | Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | Sangat Baik | |

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja, selanjutnya dilakukan analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan, berikut ini dapat dijelaskan apa saja

kendala/ permasalahan yang di hadapi, upaya yang dilakukan dan rencana tindak lanjut terhadap capaian kinerja kecamatan Jaken Tahun 2024:

a. Kendala / Masalah

- Permasalahan utama dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan permohonan surat keterangan, dimana pemohon menginginkan pelayanan cepat, tetapi persyaratan utama belum lengkap.
- Ruang pelayanan yang relatif kurang nyaman, karena ada kendala pendingin ruangan yang mengalami gangguan.

b. Upaya yang telah dilakukan

Memberikan penjelasan dengan sabar dan ramah, bahwa dalam pengurusan surat keterangan waris, harus sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Karena surat keterangan waris sangat riskan dan berdampak pada aspek kepastian hukum

c. Rencana tindak lanjut berikutnya

- Sosialisasi ke Desa agar dalam pengurusan surat keterangan dimulai dari desa, dan diharapkan desa mengecek dengan teliti persyaratan dan ketentuan yang berlaku, agar apabila ada permasalahan tidak berdampak pada hukum.
- Pelayanan berbasis elektronik (On Line), sehingga persyaratan yang masih persyaratan yang masih perlu penyempurnaan dan kelengkapan, dapat langsung di tanyakan lewat W.A pelayanan, Pemohon tidak perlu datang ke kantor.

d. Kesimpulan terhadap capaian kinerja

Secara umum kinerja Kecamatan Jaken masuk kategori berhasil dan dengan Kriteria tinggi

2.3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.7
Efisiensi penggunaan sumber daya

| NO | Tujuan/ Sasaran | INDIKATOR KINERJA | | | ANGGARAN | | | Tingkat Efisiensi |
|----|--|-------------------|------------|-----------|---------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | Targ et | Realis asi | % Capaian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian | |
| 1 | Tersedianya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat | | | | | | | |
| | Tersedianya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat | 1 | 1 | 100 | 8.085.000 | 8.035.000 | 99,38 | 0,72 |
| | Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 2 | Meningkatnya Kemandirian Desa | | | | | | | |
| | Persentase desa mandiri | 7 | 9 | 128 | 62.120.500 | 52.725.500 | 84,88% | 15,22 |
| | Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan | 100 | 100 | 100 | 42.960.000 | 42.510.000 | 98,95% | 1.05 |
| | Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, | 100 | 100 | 100 | | | | |

| NO | Tujuan/ Sasaran | INDIKATOR KINERJA | | | ANGGARAN | | | Tingkat Efisiensi |
|----|--|-------------------|------------|-----------|---------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | Targ et | Realis asi | % Capaian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian | |
| | penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu | | | | | | | |

2.4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.8

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

| No | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | % Capaian | Menunjang / Tidak menunjang |
|----|--|---|-----------|---|-------------------|-----------|-----------------------------|
| 1 | Tersedianya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | 99,38 | Menunjang |
| 2 | Tersedianya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat | Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | 100 | | | | |
| | Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani | Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani | 100 | | | | |
| | Meningkatnya Kemandirian Desa | Persentase Desa Mandiri | | | | | |
| | Persentase desa mandiri | Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan | 128 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | 84,88 | |
| | Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan | Persentase konflik sosial dan gangguan | 100 | | | | |

| No | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | % Capaian | Menunjang / Tidak menunjang |
|----|---|---|-----------|--|-------------------|-----------|-----------------------------|
| | masyarakat dalam pembangunan | ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya | | | | | |
| | Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya | Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraa n pemerintahan umum di Kecamatan | 100 | | | | |
| | Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan | Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu | 100 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | 98,95 | |
| | Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu | Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu | 100 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | 82,46 | |

3.2 REALISASI ANGGARAN

Data yang tertuang dalam LKjIP ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 guna mewujudkan visi, misi tujuan, sasaran dan program Kecamatan Jaken yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran

| NO | Program/ Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian |
|----|---|---------------|----------------|-----------|
| 1 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 8.085.000 | 8.035.000 | 99,38 |
| 2 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 62.120.500 | 52.725.500 | 84,88 |
| 3 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 42.960.000 | 42.510.000 | 98,95 |
| 4 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 28.851.800 | 23.791.800 | 82,46 |

3.3 INOVASI

Untuk Inovasi pada tahun 2024 Kecamatan Jaken adalah “ GUYUB RUKUN MBANGUN DESA “ inovasi dengan menggunakan media Drive yang digunakan untuk merangkum perencanaan Pembangunan di desa

3.4 PENGHARGAAN

Tahun 2024 Kecamatan Jaken mendapatkan penghargaan Lunas PBB yang implikasinya adalah adanya tambahan Anggaran untuk Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jaken Tahun 2024 ini merupakan wujud dari rasa tanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan masyarakat untuk disampaikan kepada Bupati.

Berdasarkan cara pencapaian tujuan, sasaran dan realisasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jaken sebagai berikut :

1. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan.
2. Kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan dan keuangan masih kurang baik secara kuantitas maupun kualitas.
3. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.
5. Belum optimalnya pegawai yang menduduki jabatan Sub Bagian maupun Seksi dalam pelaksanaannya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

B. REKOMENDASI

Berbagai permasalahan dan hambatan yang timbul sudah dapat diatasi yaitu dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada, namun demikian untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu dilakukan :

1. Pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana kerja yang berupa gedung, ruang kerja, komputer dan perlengkapannya.
2. Penempatan pegawai yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dibidang tugasnya.
3. Peningkatan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas.
4. Penambahan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang belum terdani

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jaken Tahun 2024 ini dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran secara jelas kegiatan yang sudah dan belum dilakukan sehingga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja aparat pemerintah Kecamatan Jaken di masa mendatang.

Pati, 18 Februari 2025
Camat Jaken



R.M. AHMADA MANGKU NEGARA, S.STP, M.Si
Pembina / IV a
NIP. 198907272012061001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RM. AHMADA MANGKU NEGARA, S.STP, M.Si

Jabatan : Camat Jaken Kabupaten Pati

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT

Jabatan : Pj Bupati Pati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pati, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT

Pihak Pertama,

RM. AHMADA M NEGARA, S.STP, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN JAKEN KABUPATEN PATI**

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A. | Meningkatnya pelayanan kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 3,33 |
| 1. | Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | 1 |
| a. | Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan | Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani | 100% |
| 2. | Meningkatnya Kemandirian Desa | Persentase Desa Mandiri | 24% |
| a. | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan | Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan | 100% |
| b. | Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban | Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya | 100% |
| c. | Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan | Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan | 100% |
| d. | Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan | Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu | 100% |

| PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
|---|----------------|------------|
| 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Rp. 8.085.000 | APBD KAB |
| 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rp 62.625.500 | APBD KAB |
| 3 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Rp 48,960,000 | APBD KAB |
| 4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 31.476.800 | APBD KAB |



Pj. BUPATI PATI,

HENGGAR BUDI ANGGORO, S.T,M.T



CAMAT JAKEN,

RM. AHMADA M. NEGARA, S.STP, M.Si



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RM, AHMADA MANGKU NEGARA, S.STP, M.Si

Jabatan : Camat Jaken Kabupaten Pati

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr.Ir. SUJARWANTO DWI ATMOKO, M.Si

Jabatan : Pj Bupati Pati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pati, 10 Oktober 2024



Pihak Kedua,

Dr.Ir. SUJARWANTO DWI ATMOKO, M.Si



Pihak Pertama,

RM, AHMADA M-NEGARA, S.STP, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN JAKEN KABUPATEN PATI**

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A. | Meningkatnya pelayanan kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 3,33 |
| 1. | Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat | 1 |
| a. | Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan | Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani | 100% |
| 2. | Meningkatnya Kemandirian Desa | Persentase Desa Mandiri | 5% |
| a. | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan | Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan | 100% |
| b. | Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban | Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya | 100% |
| c. | Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan | Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan | 100% |
| d. | Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan | Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu | 100% |

| PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
|---|----------------|------------|
| 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Rp. 8,085,000 | APBDP KAB |
| 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rp. 62.120.500 | APBDP KAB |
| 3 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Rp. 42.960.000 | APBDP KAB |
| 4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 28.851.800 | APBDP KAB |

Pati, 10 Oktober 2024

 **Bupati Pati**

Dwi SUJARWANTO DWI ATMOKO, M.Si

Camat Jaken Kabupaten Pati
 
RM. AHMADA M. NEGARA, S.STP, M.Si